



1 Mengapa APBN Penting?



- Menentukan prioritas pembangunan nasional
- Menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli
- Membiayai layanan publik dan perlindungan sosial
- Mengarahkan investasi, produktivitas, dan pemerataan

2 APBN sebagai Mesin Pertumbuhan



Infrastruktur:
menurunkan biaya logistik



Pendidikan:
membangun modal manusia



Kesehatan & gizi:
meningkatkan produktivitas



Perlindungan sosial:
menjaga konsumsi rumah tangga



Transformasi industri:
hilirisasi, digitalisasi, energi

3 APBN sebagai Mesin Politik



Legitimasi pemerintah



Program populer dan bantuan langsung



Subsidi energi dan stabilitas sosial



Transfer ke daerah dan kompromi politik



Risiko patronase, rente, dan siklus anggaran

4 Dilema Utama

Pro-Pertumbuhan

- Belanja ekspansif
- Stimulus sektor riil
- Dukungan daya beli
- Percepatan proyek prioritas



Pro-Kehati-hatian Fiskal

- Defisit harus terkendali
- Utang dan bunga dijaga
- Subsidi harus tepat sasaran
- Belanja dinilai berdasarkan hasil

5 Risiko Jika Politik Terlalu Dominan



Belanja tidak produktif



Defisit dipakai menunda reformasi



Subsidi melebar dan mahal



Kepercayaan pasar melemah

6 Arah APBN yang Sehat



Disiplin fiskal yang kredibel



Belanja berbasis dampak, bukan sekadar serapan



Subsidi dan bansos lebih tepat sasaran



Belanja pendidikan, kesehatan, dan riset dilindungi



Transfer daerah berbasis kinerja



Transparansi proyek dan risiko off-budget



Pesan Kunci

APBN yang baik bukan APBN yang bebas dari politik, melainkan APBN yang menjadikan politik sebagai energi pembangunan—produktif, inklusif, akuntabel, dan berkeadilan.



Pertumbuhan



Keadilan



Stabilitas



Akuntabilitas

*Rudy C Tarumingkeng: Ketika APBN Menjadi Mesin Politik dan Mesin
Pertumbuhan*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

23 Juni 2026

KETIKA APBN MENJADI MESIN POLITIK DAN MESIN PERTUMBUHAN

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN bukan sekadar dokumen teknokratis yang memuat angka pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan. APBN adalah instrumen paling konkret dari pilihan politik negara: siapa yang dilindungi, sektor mana yang diprioritaskan, wilayah mana yang dibangun, kelompok sosial mana yang menerima dukungan, dan generasi mana yang akan menanggung beban fiskal di masa depan. Dalam kerangka ekonomi-politik, APBN dapat berfungsi sebagai **mesin pertumbuhan** ketika belanja negara diarahkan untuk memperkuat produktivitas, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melindungi daya beli, memperluas kesempatan ekonomi, dan menciptakan stabilitas makroekonomi. Namun APBN juga dapat menjadi **mesin politik** ketika anggaran lebih banyak digunakan untuk menjaga koalisi kekuasaan, membangun legitimasi elektoral, mendistribusikan patronase, mempertahankan subsidi populer, atau menunda reformasi yang secara ekonomi diperlukan tetapi secara politik tidak nyaman.

Dalam konteks Indonesia, tema ini semakin penting karena APBN 2026 telah ditetapkan melalui **UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026**. JDIH Kementerian Keuangan mencatat bahwa UU tersebut merupakan dasar hukum APBN 2026 dan berlaku sebagai instrumen resmi pengelolaan

keuangan negara tahun berjalan. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#)) Postur APBN 2026 disepakati dengan pendapatan negara sekitar Rp3.153,6 triliun, belanja negara sekitar Rp3.842,7 triliun, dan defisit sekitar 2,68% terhadap PDB. ([Kementerian Keuangan](#)) Pada saat yang sama, OECD memproyeksikan defisit anggaran Indonesia dapat melebar menuju sekitar 3,0% PDB pada 2026 karena tekanan subsidi energi dan program makan bergizi, sementara utang publik diperkirakan tetap sekitar 41% PDB. ([OECD](#))

Artikel ini berargumen bahwa APBN yang sehat bukanlah APBN yang steril dari politik, sebab anggaran negara memang selalu merupakan hasil dari proses politik. Yang lebih penting adalah memastikan agar politik anggaran tidak jatuh menjadi politik rente, melainkan menjadi politik pembangunan. APBN harus menjadi ruang konversi aspirasi publik menjadi kebijakan produktif, bukan sekadar alat distribusi keuntungan jangka pendek. Dengan demikian, tantangan utama Indonesia bukan memilih antara APBN sebagai mesin politik atau mesin pertumbuhan, melainkan membangun tata kelola agar energi politik yang terkandung dalam APBN diarahkan kepada pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, akuntabel, dan berkeadilan.

Kata kunci: *APBN, politik anggaran, pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, defisit, subsidi, belanja publik, ekonomi-politik, Indonesia, tata kelola fiskal.*

1. Pendahuluan

APBN adalah cermin wajah negara. Di dalam APBN terlihat prioritas, keberpihakan, kemampuan, keterbatasan, dan kompromi negara. Apa yang dinyatakan dalam pidato politik sering bersifat normatif, tetapi apa yang tertulis dalam APBN bersifat operasional. Negara dapat berkata bahwa pendidikan penting, tetapi besarnya alokasi dan mutu belanja pendidikan

menunjukkan apakah pernyataan itu sungguh menjadi prioritas. Negara dapat berkata bahwa rakyat kecil dilindungi, tetapi desain subsidi, bantuan sosial, dan perpajakan menunjukkan siapa yang benar-benar menerima manfaat. Negara dapat berkata bahwa pertumbuhan ekonomi dikejar, tetapi kualitas belanja modal, riset, infrastruktur, dan reformasi produktivitas menunjukkan apakah pertumbuhan itu dibangun secara kokoh atau hanya didorong oleh konsumsi jangka pendek.

Karena itu, APBN tidak pernah netral. Ia adalah dokumen ekonomi sekaligus dokumen politik. Dalam demokrasi, anggaran publik lahir dari proses politik: pemerintah menyusun rancangan, DPR membahas dan menyetujui, kementerian dan lembaga mengusulkan program, daerah meminta transfer, kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi, pelaku usaha mengharapkan insentif, dan publik menilai hasilnya. Semua aktor itu membawa kepentingan masing-masing. Maka APBN adalah arena pertemuan antara teknokrasi, politik, birokrasi, pasar, dan masyarakat.

Dalam teori ekonomi publik klasik, APBN memiliki tiga fungsi utama: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berarti negara menggunakan anggaran untuk menyediakan barang publik dan memperbaiki kegagalan pasar. Fungsi distribusi berarti negara menggunakan pajak dan belanja untuk mengurangi ketimpangan serta melindungi kelompok rentan. Fungsi stabilisasi berarti negara menggunakan kebijakan fiskal untuk menjaga pertumbuhan, inflasi, kesempatan kerja, dan stabilitas makroekonomi. Ketiga fungsi ini menjadikan APBN sebagai instrumen pembangunan.

Namun, teori ekonomi-politik mengingatkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh kalkulasi efisiensi. Politisi ingin mempertahankan dukungan. Partai membutuhkan sumber daya. Birokrasi ingin menjaga kewenangan dan anggaran. Kelompok bisnis mencari insentif, proteksi, dan proyek. Pemerintah daerah menginginkan transfer lebih besar. Publik menginginkan manfaat langsung. Di sinilah APBN dapat berubah menjadi

mesin politik: bukan dalam arti selalu buruk, tetapi dalam arti bahwa belanja, pajak, subsidi, dan defisit menjadi bagian dari strategi kekuasaan.

Artikel ini menggunakan judul **“Ketika APBN Menjadi Mesin Politik dan Mesin Pertumbuhan”** untuk menunjukkan ambivalensi APBN. Di satu sisi, APBN adalah alat negara untuk menggerakkan ekonomi. Di sisi lain, APBN adalah alat politik untuk menjaga legitimasi. Keduanya tidak selalu bertentangan. Politik yang baik dapat menghasilkan APBN yang mendukung pertumbuhan inklusif. Tetapi politik yang buruk dapat menghasilkan APBN populis, boros, tidak produktif, dan penuh rente.

Dalam konteks Indonesia tahun 2026, diskusi ini sangat relevan. APBN 2026 merupakan anggaran pertama yang sepenuhnya mencerminkan arah kebijakan pemerintahan baru. Pemerintah menempatkan APBN sebagai instrumen untuk mendorong sektor riil, menjaga daya beli, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta mempercepat pertumbuhan. Namun pada saat yang sama, tekanan global meningkat: harga energi, volatilitas pasar keuangan, pelemahan rupiah, kebutuhan subsidi, biaya program sosial besar, dan ketidakpastian kebijakan. OECD mencatat bahwa pertumbuhan Indonesia diproyeksikan 4,7% pada 2026 dan 5,0% pada 2027, dengan tekanan dari harga energi, biaya pinjaman, pelemahan pasar tenaga kerja, serta ketidakpastian kebijakan. ([OECD](#)) IMF juga menekankan bahwa pertumbuhan Indonesia tetap kuat, tetapi membutuhkan *policy mix* yang hati-hati, penguatan *guardrails*, dan reformasi struktural agar kerentanan tidak menumpuk. ([IMF](#))

Dengan demikian, pertanyaan utama artikel ini adalah: **bagaimana APBN dapat menjadi mesin pertumbuhan tanpa tersandera menjadi mesin politik jangka pendek?**

2. APBN sebagai Kontrak Sosial Fiskal

APBN pada dasarnya adalah kontrak sosial fiskal antara negara dan rakyat. Rakyat membayar pajak, menerima layanan publik, dan memberi mandat

politik kepada pemerintah. Pemerintah mengumpulkan penerimaan, membelanjakan dana, mengelola utang, dan mempertanggungjawabkan hasilnya. Dalam kontrak sosial yang sehat, rakyat percaya bahwa pajak dan utang digunakan untuk kepentingan umum. Negara percaya bahwa warga akan patuh karena melihat manfaat nyata dari kebijakan publik.

Masalah muncul ketika kontrak ini melemah. Jika masyarakat merasa pajak tidak kembali dalam bentuk layanan, kepatuhan pajak menurun. Jika publik melihat anggaran bocor, subsidi salah sasaran, proyek tidak produktif, atau belanja lebih menguntungkan elite, kepercayaan fiskal melemah. Jika pemerintah menganggap rakyat hanya sebagai objek penerimaan negara, bukan pemilik sah APBN, maka legitimasi kebijakan fiskal rapuh.

APBN menjadi kontrak sosial karena menyangkut tiga dimensi keadilan.

Pertama, **keadilan antar-kelompok**. Siapa yang membayar pajak dan siapa yang menerima manfaat? Apakah kelompok mampu membayar sesuai kapasitasnya? Apakah kelompok rentan memperoleh perlindungan? Apakah UMKM mendapat ruang? Apakah insentif lebih banyak dinikmati korporasi besar atau sektor produktif yang menciptakan pekerjaan?

Kedua, **keadilan antar-wilayah**. Indonesia adalah negara kepulauan dengan ketimpangan wilayah yang besar. APBN menentukan bagaimana pusat mendukung daerah, bagaimana infrastruktur dibangun di luar Jawa, bagaimana layanan dasar dibiayai, dan bagaimana wilayah tertinggal memperoleh akses pembangunan.

Ketiga, **keadilan antar-generasi**. Defisit dan utang hari ini berarti kewajiban masa depan. Jika utang digunakan untuk membangun produktivitas, generasi berikutnya menerima manfaat. Tetapi jika utang digunakan untuk belanja konsumtif, generasi berikutnya hanya menerima beban.

Karena itu, APBN tidak boleh diperlakukan sebagai "uang pemerintah". APBN adalah uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah. Di sinilah prinsip akuntabilitas menjadi pusat. Pemerintah tidak hanya harus menjelaskan

berapa besar belanja, tetapi juga mengapa belanja itu dipilih, apa hasilnya, siapa penerima manfaatnya, dan bagaimana risikonya dikendalikan.

3. APBN sebagai Mesin Pertumbuhan

APBN menjadi mesin pertumbuhan ketika ia memperbesar kapasitas produksi nasional. Pertumbuhan yang sehat tidak hanya berarti naiknya angka PDB dalam satu tahun, tetapi meningkatnya kemampuan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa bernilai tambah secara berkelanjutan. Dengan demikian, APBN yang pro-pertumbuhan bukan sekadar APBN yang besar, melainkan APBN yang berkualitas.

Ada beberapa jalur utama APBN sebagai mesin pertumbuhan.

3.1 Belanja Infrastruktur dan Penurunan Biaya Ekonomi

Infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, bandara, irigasi, listrik, telekomunikasi, dan transportasi publik dapat menurunkan biaya logistik, mempercepat mobilitas barang dan manusia, serta membuka akses pasar. Di negara kepulauan seperti Indonesia, biaya logistik adalah salah satu hambatan produktivitas. APBN dapat mengatasi kegagalan pasar karena banyak infrastruktur memiliki karakter barang publik atau membutuhkan investasi jangka panjang yang tidak selalu menarik bagi swasta.

Namun tidak semua infrastruktur otomatis produktif. Infrastruktur harus dipilih berdasarkan kebutuhan ekonomi, konektivitas, dampak sosial, kelayakan fiskal, dan keberlanjutan lingkungan. Infrastruktur yang tidak terhubung dengan pusat produksi atau permintaan dapat menjadi beban pemeliharaan. Karena itu, belanja infrastruktur harus disertai perencanaan, evaluasi, dan tata kelola proyek yang kuat.

3.2 Belanja Pendidikan dan Modal Manusia

Pertumbuhan jangka panjang membutuhkan SDM berkualitas. Pendidikan, pelatihan vokasi, riset, dan penguatan perguruan tinggi adalah investasi yang hasilnya tidak selalu langsung terlihat, tetapi menentukan

produktivitas masa depan. Negara yang ingin naik kelas dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis pengetahuan harus menjadikan pendidikan sebagai investasi strategis.

Dalam konteks AI, digitalisasi, dan otomasi, belanja pendidikan harus bergerak dari sekadar memenuhi kewajiban alokasi menuju peningkatan kualitas. Pertanyaan penting bukan hanya berapa persen APBN untuk pendidikan, tetapi apakah belanja itu menghasilkan literasi, numerasi, kemampuan berpikir kritis, kompetensi digital, riset, inovasi, dan karakter.

3.3 Belanja Kesehatan dan Produktivitas

Kesehatan adalah fondasi produktivitas. Tenaga kerja yang sehat lebih produktif, anak yang cukup gizi lebih mampu belajar, dan masyarakat yang memperoleh layanan kesehatan preventif lebih sedikit kehilangan waktu kerja. Program makan bergizi, imunisasi, layanan ibu dan anak, pencegahan penyakit tidak menular, dan penguatan fasilitas kesehatan dapat meningkatkan produktivitas jangka panjang.

Namun belanja kesehatan juga harus tepat sasaran dan efisien. Program sosial besar dapat menjadi mesin pertumbuhan jika memperbaiki modal manusia, tetapi dapat menjadi beban fiskal jika desain, data penerima, logistik, kualitas, dan pengawasan lemah. OECD menilai program makan gratis dapat membantu mengurangi malnutrisi anak dan memperbaiki kesehatan publik, tetapi pengendalian biaya dan penargetan yang lebih baik diperlukan agar biaya fiskalnya terkendali. ([OECD](#))

3.4 Perlindungan Sosial dan Stabilitas Permintaan

APBN menjaga pertumbuhan melalui perlindungan daya beli. Bantuan sosial, subsidi yang tepat sasaran, dan program perlindungan pekerja dapat menahan penurunan konsumsi saat krisis. Dalam ekonomi yang konsumsi rumah tangganya besar, menjaga daya beli kelompok bawah dan menengah dapat membantu stabilitas pertumbuhan.

Namun perlindungan sosial harus dibedakan dari populisme fiskal. Perlindungan sosial yang baik berbasis data, tepat sasaran, sementara, adaptif, dan mendorong pemberdayaan. Populisme fiskal cenderung luas, mahal, kurang tepat sasaran, dan sulit dihentikan karena menjadi populer secara politik.

3.5 Kebijakan Industri dan Transformasi Struktural

APBN dapat mendorong sektor strategis melalui insentif, pembiayaan, riset, pelatihan, infrastruktur kawasan industri, dan dukungan ekspor. Hilirisasi, energi terbarukan, ekonomi digital, pangan, kesehatan, dan industri manufaktur bernilai tambah dapat diperkuat melalui kebijakan fiskal.

Namun kebijakan industri harus menghindari jebakan rente. Insentif harus disertai indikator kinerja: ekspor, pekerjaan berkualitas, transfer teknologi, kandungan lokal, produktivitas, dan keberlanjutan. Tanpa indikator, insentif fiskal dapat menjadi hadiah bagi kelompok kuat, bukan alat transformasi.

4. APBN sebagai Mesin Politik

APBN menjadi mesin politik karena anggaran adalah sumber legitimasi dan distribusi. Dalam negara demokratis, pemerintah membutuhkan dukungan publik, dukungan partai, dukungan DPR, dukungan daerah, dan dukungan kelompok sosial. APBN menjadi alat untuk membangun dan menjaga dukungan itu.

Mesin politik APBN bekerja melalui beberapa mekanisme.

4.1 Distribusi Program Populer

Program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat sering memiliki nilai politik tinggi. Bantuan sosial, subsidi energi, subsidi pangan, program makan, bantuan pendidikan, dan bantuan UMKM dapat memperkuat legitimasi pemerintah. Hal ini tidak salah jika program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan publik. Namun risiko muncul ketika program dirancang lebih untuk popularitas daripada efektivitas.

Program populer sering sulit dikurangi meskipun biaya fiskalnya membesar. Pemerintah takut kehilangan dukungan. DPR takut dituduh tidak pro-rakyat. Akibatnya, subsidi luas yang tidak tepat sasaran dapat bertahan lama karena secara politik nyaman.

4.2 Patronase dan Koalisi Kekuasaan

Dalam sistem politik koalisi, anggaran dapat menjadi alat menjaga dukungan partai dan kelompok politik. Kementerian, proyek, dana daerah, dan program sektoral dapat menjadi bagian dari kompromi politik. Di tingkat daerah, transfer pusat dapat dipersepsikan sebagai sumber daya politik. Di tingkat proyek, pengadaan barang dan jasa dapat menjadi arena patronase.

Patronase tidak selalu terlihat sebagai korupsi langsung. Ia dapat bekerja melalui prioritas anggaran, penempatan proyek, pemilihan mitra, atau desain program. Karena itu, transparansi dan audit menjadi penting.

4.3 Siklus Politik Anggaran

Teori *political budget cycle* menjelaskan bahwa pemerintah dapat meningkatkan belanja atau menunda kebijakan tidak populer menjelang momen politik untuk memperkuat dukungan. Belanja yang terlihat langsung sering lebih disukai daripada reformasi struktural yang manfaatnya baru terasa lama. Akibatnya, APBN cenderung bias kepada jangka pendek.

Dalam demokrasi, pemerintah memang perlu peka terhadap aspirasi publik. Namun jika seluruh desain fiskal tunduk pada siklus politik pendek, pembangunan jangka panjang terganggu. Investasi SDM, riset, reformasi subsidi, dan efisiensi birokrasi sering kalah dari program yang cepat terlihat.

4.4 Politik Subsidi

Subsidi adalah contoh paling jelas hubungan antara APBN dan politik. Subsidi energi melindungi daya beli dan menahan inflasi. Tetapi subsidi

energi luas sering lebih banyak dinikmati kelompok yang konsumsi energinya besar. OECD menilai efisiensi belanja publik Indonesia dapat ditingkatkan melalui penargetan subsidi energi yang lebih baik kepada rumah tangga rentan; transfer langsung kepada kelompok berpendapatan rendah dan pekerja yang bergantung pada energi lebih disarankan daripada kontrol harga luas yang mahal dan kurang tepat sasaran. ([OECD](#))

Masalah politiknya jelas: reformasi subsidi hampir selalu tidak populer. Harga energi menyentuh kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga dapat memicu inflasi dan protes. Karena itu, pemerintah sering memilih menahan harga, meskipun APBN tertekan. Di sinilah APBN menjadi mesin politik stabilitas sosial.

4.5 Politik Defisit dan Utang

Defisit dapat menjadi instrumen pertumbuhan jika digunakan untuk belanja produktif. Namun defisit juga dapat menjadi cara menunda keputusan sulit. Pemerintah dapat membiayai program populer dengan utang, sementara biaya politiknya ditanggung masa depan. Ini menciptakan risiko moral antargenerasi.

Indonesia memiliki aturan defisit 3% PDB sebagai pagar fiskal. Dalam APBN 2026, target defisit disepakati sekitar 2,68% PDB, masih di bawah batas legal. ([Anggaran Kemenkeu](#)) Namun OECD memperkirakan defisit dapat melebar menuju 3,0% PDB pada 2026 jika tekanan subsidi energi dan program belanja besar tidak sepenuhnya diimbangi. ([OECD](#)) Ini menunjukkan bahwa politik belanja dan disiplin fiskal harus terus dijaga.

5. APBN 2026: Antara Akselerasi Pertumbuhan dan Risiko Fiskal

APBN 2026 menjadi studi kasus penting karena mencerminkan upaya pemerintah menjadikan anggaran sebagai penggerak ekonomi. Secara hukum, APBN 2026 ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2025.

([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#)) Dalam posturnya, pendapatan

negara disepakati sekitar Rp3.153,6 triliun dan belanja negara sekitar Rp3.842,7 triliun. ([Kementerian Keuangan](#)) Defisit APBN 2026 disepakati sekitar 2,68% PDB, masih di bawah batas fiskal 3%. ([Anggaran Kemenkeu](#))

Dari sisi narasi kebijakan, APBN 2026 diarahkan untuk memperkuat kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. ([Anggaran Kemenkeu](#)) Narasi ini penting karena menunjukkan bahwa APBN tidak hanya dipakai sebagai alat stabilisasi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sektor riil. Pemerintah ingin belanja negara mendorong pertumbuhan lebih cepat, memperkuat daya beli, dan memperluas aktivitas ekonomi.

Namun APBN 2026 juga berada dalam ruang risiko. OECD menyebut fiskal Indonesia pada 2026 diproyeksikan bersifat mendukung pertumbuhan karena peningkatan belanja subsidi bahan bakar dan program makan gratis hanya sebagian diimbangi oleh kenaikan pajak dan pemotongan belanja lain. ([OECD](#)) OECD juga memperkirakan harga minyak yang lebih tinggi dapat menaikkan defisit sekitar 0,6% PDB jika pembekuan harga BBM bersubsidi dipertahankan. ([OECD](#)) Dengan demikian, APBN 2026 berada pada tegangan antara ekspansi dan kehati-hatian.

Ada tiga isu utama dalam membaca APBN 2026.

Pertama, **kualitas belanja**. Belanja besar hanya menjadi mesin pertumbuhan jika menghasilkan produktivitas. Program makan bergizi, pertahanan, subsidi, infrastruktur, dan transfer daerah harus dievaluasi berdasarkan hasil, bukan hanya serapan.

Kedua, **risiko fiskal energi**. Harga minyak dan nilai tukar rupiah dapat memengaruhi subsidi, inflasi, dan defisit. APBN harus memiliki skenario jika harga energi global naik lebih lama.

Ketiga, **risiko off-budget**. OECD menyebut belanja modal di luar APBN melalui Danantara dapat mendukung investasi dan memperkuat sikap fiskal yang secara keseluruhan suportif. Namun ini juga menuntut tata kelola kuat agar risiko kontinjensi tidak tersembunyi. ([OECD](#))

6. Politik Pertumbuhan: Mengapa Pemerintah Membutuhkan APBN yang Ekspansif

Pemerintah mana pun membutuhkan pertumbuhan. Pertumbuhan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan pajak, memperbaiki daya beli, memperluas kelas menengah, dan memberi legitimasi politik. Dalam negara berkembang, pertumbuhan juga menjadi syarat keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan infrastruktur.

APBN ekspansif sering dipilih ketika pemerintah ingin mempercepat aktivitas ekonomi. Belanja pemerintah dapat langsung masuk ke perekonomian melalui gaji, pengadaan, bantuan sosial, proyek, subsidi, dan transfer daerah. Dalam jangka pendek, belanja pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat. Dalam jangka panjang, belanja produktif dapat meningkatkan kapasitas produksi.

Namun ekspansi fiskal memiliki batas. Jika belanja tidak produktif, defisit meningkat tanpa pertumbuhan yang cukup. Jika pembiayaan utang meningkat, beban bunga dapat mengurangi ruang belanja masa depan. Jika pasar meragukan disiplin fiskal, nilai tukar dan yield obligasi dapat tertekan. Jika ekspansi fiskal bertemu inflasi dan suku bunga tinggi, bank sentral harus merespons dengan kebijakan moneter lebih ketat, sehingga sebagian efek pertumbuhan hilang.

Karena itu, APBN sebagai mesin pertumbuhan harus dibangun di atas prinsip **fiscal multiplier yang berkualitas**. Belanja yang memiliki multiplier tinggi adalah belanja yang mendorong permintaan sekaligus memperbaiki kapasitas produksi. Contohnya adalah infrastruktur produktif, pendidikan, kesehatan, riset, energi, dan dukungan UMKM yang tepat sasaran. Sebaliknya, belanja yang bocor, salah sasaran, atau hanya mendorong konsumsi impor memiliki multiplier lebih rendah.

7. Politik Distribusi: APBN dan Pertanyaan “Untuk Siapa?”

Setiap rupiah belanja negara adalah pilihan distribusi. Ketika APBN membiayai subsidi energi, penerima manfaatnya adalah konsumen energi. Ketika APBN membiayai bantuan sosial, penerima manfaatnya adalah rumah tangga sasaran. Ketika APBN memberi insentif pajak kepada industri, penerima manfaatnya adalah pelaku usaha tertentu. Ketika APBN membayar bunga utang, penerima manfaatnya adalah pemegang surat utang. Ketika APBN membangun jalan, penerima manfaatnya adalah wilayah dan sektor yang terhubung oleh jalan itu.

Pertanyaan “untuk siapa?” sangat penting karena APBN sering dibungkus dalam istilah kepentingan nasional. Padahal, kepentingan nasional harus diterjemahkan menjadi distribusi manfaat yang nyata. Jika kebijakan disebut pro-rakyat tetapi manfaatnya lebih banyak dinikmati kelompok mampu, maka ada masalah. Jika kebijakan disebut pro-investasi tetapi tidak menciptakan pekerjaan dan transfer teknologi, maka manfaat publiknya perlu dipertanyakan.

Dalam konteks Indonesia, distribusi APBN harus menjawab beberapa ketimpangan: ketimpangan pendapatan, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendidikan, ketimpangan kesehatan, ketimpangan digital, dan ketimpangan akses ekonomi. APBN dapat menjadi alat koreksi jika dirancang dengan basis data yang baik. Tetapi APBN dapat memperkuat ketimpangan jika belanja lebih banyak mengalir ke kelompok yang sudah kuat.

8. Politik Penerimaan: Pajak, Legitimasi, dan Keadilan

APBN tidak hanya soal belanja. APBN juga soal penerimaan. Negara yang ingin membiayai pembangunan harus memiliki basis penerimaan kuat. Pajak adalah tulang punggung kedaulatan fiskal. Tanpa pajak yang cukup, negara bergantung pada utang, komoditas, atau pembiayaan luar.

Namun pajak selalu politis. Menaikkan pajak dapat menimbulkan resistensi. Memperluas basis pajak membutuhkan kepercayaan. Menutup celah penghindaran pajak sering berhadapan dengan kelompok kuat. Memberi insentif pajak kepada investor dapat mendorong investasi, tetapi juga mengurangi penerimaan jika tidak dievaluasi. Karena itu, politik pajak adalah politik keadilan.

APBN sebagai mesin pertumbuhan membutuhkan pajak yang tidak mematikan usaha, tetapi cukup kuat untuk membiayai negara. APBN sebagai kontrak sosial membutuhkan pajak yang dirasakan adil. Kelompok berpenghasilan tinggi dan sektor yang memperoleh rente harus memberi kontribusi sepadan. UMKM dan kelas menengah tidak boleh menjadi sasaran mudah sementara kelompok besar menikmati celah. Digitalisasi pajak dapat membantu, tetapi tetap membutuhkan legitimasi.

Pajak yang baik memiliki tiga ciri: adil, efisien, dan dipercaya. Adil berarti beban sesuai kemampuan. Efisien berarti tidak terlalu merusak aktivitas ekonomi. Dipercaya berarti masyarakat melihat pajak kembali dalam bentuk layanan publik.

9. Politik Belanja Daerah: Transfer, Otonomi, dan Ketimpangan Wilayah

Indonesia adalah negara luas dengan otonomi daerah. Karena itu, APBN tidak hanya bekerja melalui belanja pusat, tetapi juga transfer ke daerah. Transfer daerah berfungsi membiayai layanan dasar, mengurangi ketimpangan fiskal, mendukung pembangunan lokal, dan menjaga stabilitas politik pusat-daerah.

Namun transfer daerah juga dapat menjadi mesin politik. Daerah menginginkan dana lebih besar. Pusat ingin menjaga kontrol kebijakan. DPR memperjuangkan kepentingan daerah pemilihannya. Kepala daerah memiliki agenda politik lokal. Dalam situasi ini, transfer tidak selalu murni berbasis kebutuhan objektif.

Masalah utama transfer daerah adalah kualitas penggunaan. Dana yang besar tidak selalu menghasilkan layanan publik yang baik. Banyak daerah menghadapi keterbatasan kapasitas perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan evaluasi. Akibatnya, dana dapat habis untuk belanja rutin atau proyek kecil yang tidak transformasional.

APBN sebagai mesin pertumbuhan harus memastikan transfer daerah menghasilkan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi, konektivitas, dan ekonomi lokal. Untuk itu, dana transfer perlu disertai indikator kinerja, pendampingan kapasitas, audit, dan keterbukaan data.

10. Subsidi Energi: Antara Stabilitas Sosial dan Efisiensi Fiskal

Subsidi energi adalah salah satu titik paling sensitif dalam APBN Indonesia. Dari sisi sosial, subsidi energi membantu menahan harga, menjaga daya beli, dan mengurangi tekanan inflasi. Dari sisi politik, subsidi energi populer karena manfaatnya langsung dirasakan. Dari sisi fiskal, subsidi energi dapat menjadi beban besar, terutama ketika harga minyak global naik atau rupiah melemah.

OECD mencatat bahwa pembekuan harga BBM bersubsidi dapat melindungi inflasi domestik dari harga energi global, tetapi tidak sepenuhnya melindungi ekonomi dari kenaikan biaya input pertanian dan industri intensif energi. ([OECD](#)) OECD juga memperingatkan bahwa kontrol harga yang luas mahal dan kurang tepat sasaran, sehingga transfer tertarget kepada rumah tangga berpendapatan rendah dan pekerja yang bergantung pada energi lebih disarankan. ([OECD](#))

Dilema subsidi energi menunjukkan bagaimana APBN menjadi mesin politik dan mesin stabilisasi sekaligus. Secara politik, subsidi menjaga legitimasi. Secara ekonomi, subsidi menahan inflasi jangka pendek. Tetapi secara fiskal, subsidi dapat mengurangi ruang untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan transisi energi.

Reformasi subsidi harus dilakukan dengan hati-hati. Kenaikan harga energi tanpa perlindungan sosial dapat memukul rakyat kecil. Tetapi mempertahankan subsidi luas tanpa batas dapat merusak APBN. Solusi terbaik adalah transisi bertahap menuju subsidi tepat sasaran, peningkatan transportasi publik, energi terbarukan, efisiensi energi, dan bantuan langsung bagi kelompok rentan.

11. APBN, Danantara, dan Pembiayaan di Luar Anggaran

Salah satu isu baru dalam politik fiskal Indonesia adalah meningkatnya penggunaan instrumen di luar APBN untuk mendukung investasi. Danantara sebagai badan investasi dan holding negara dapat menjadi instrumen mempercepat proyek strategis, menarik modal swasta, dan mendukung industrialisasi. OECD menyebut bahwa penguatan tata kelola Danantara dapat membantu memaksimalkan dampak ekonomi positif investasinya. ([OECD](#))

Namun pembiayaan di luar APBN harus dipahami secara hati-hati. Secara formal, proyek yang dibiayai melalui BUMN, badan investasi, atau skema kemitraan mungkin tidak langsung masuk defisit APBN. Tetapi secara ekonomi, jika proyek gagal atau membutuhkan dukungan negara, risikonya dapat kembali ke APBN. Inilah yang disebut risiko kontinjensi.

Karena itu, prinsipnya sederhana: **off-budget tidak boleh berarti off-accountability**. Semua proyek strategis yang memakai aset negara, jaminan negara, atau potensi dukungan negara harus transparan. Publik perlu tahu sumber pembiayaan, risiko, manfaat, mitra, dan mekanisme pertanggungjawaban. Jika tidak, pembiayaan kreatif dapat berubah menjadi cara menyembunyikan beban fiskal.

APBN sebagai mesin pertumbuhan boleh menggunakan inovasi pembiayaan, tetapi APBN sebagai kontrak publik menuntut transparansi penuh.

12. Risiko APBN sebagai Mesin Politik yang Berlebihan

Ketika APBN terlalu dominan sebagai mesin politik, beberapa risiko muncul.

Pertama, **belanja menjadi tidak produktif**. Program dipilih karena populer, bukan karena dampak ekonomi. Proyek dipilih karena nilai politik, bukan kelayakan.

Kedua, **defisit menjadi alat menunda reformasi**. Pemerintah membiayai semua tuntutan dengan utang, tanpa memperbaiki penerimaan dan kualitas belanja.

Ketiga, **subsidi menjadi sulit direformasi**. Kebijakan yang seharusnya sementara menjadi permanen karena popularitas politik.

Keempat, **anggaran menjadi sumber rente**. Pengadaan, proyek, dan insentif dapat ditangkap oleh kelompok tertentu.

Kelima, **kepercayaan pasar melemah**. Jika investor melihat APBN tidak disiplin, biaya utang meningkat, rupiah tertekan, dan ruang fiskal menyempit.

Keenam, **keadilan antargenerasi terganggu**. Generasi masa depan membayar utang untuk belanja yang tidak meningkatkan produktivitas.

Ketujuh, **negara kehilangan kemampuan strategis**. Anggaran habis untuk kewajiban rutin, bunga, subsidi, dan belanja politik jangka pendek, sehingga ruang untuk investasi masa depan mengecil.

13. Risiko APBN sebagai Mesin Pertumbuhan yang Terlalu Teknokratis

Sebaliknya, APBN yang hanya dipahami sebagai mesin pertumbuhan teknokratis juga berisiko. Jika pemerintah hanya mengejar pertumbuhan tanpa sensitivitas politik dan sosial, kebijakan dapat kehilangan legitimasi.

Reformasi subsidi yang benar secara ekonomi tetapi dilakukan tanpa perlindungan sosial dapat memicu ketidakpuasan. Pembangunan infrastruktur yang efisien secara makro tetapi menggusur masyarakat tanpa kompensasi adil dapat menciptakan konflik. Kebijakan pajak yang meningkatkan penerimaan tetapi membebani kelompok rentan dapat melemahkan kepercayaan.

Karena itu, APBN harus menggabungkan rasionalitas ekonomi dan legitimasi sosial. Pertumbuhan harus inklusif. Efisiensi harus disertai keadilan. Reformasi harus disertai komunikasi publik. Penghematan harus disertai perlindungan kelompok rentan. Teknokrasi tanpa demokrasi dapat menjadi kering dan tidak peka; politik tanpa teknokrasi dapat menjadi boros dan jangka pendek.

14. Tata Kelola APBN: Mengubah Politik Menjadi Nilai Publik

Kunci APBN yang baik bukan menghilangkan politik, tetapi mengelola politik agar menghasilkan nilai publik. Beberapa prinsip tata kelola penting perlu ditegakkan.

Pertama, **transparansi anggaran**. Publik harus dapat mengetahui postur APBN, alokasi, penerima manfaat, proyek, dan hasilnya. Data anggaran harus mudah diakses dan dipahami.

Kedua, **penganggaran berbasis kinerja**. Anggaran tidak boleh hanya berbasis input dan serapan, tetapi hasil. Kementerian dan lembaga harus dinilai berdasarkan output dan outcome.

Ketiga, **evaluasi program secara berkala**. Program yang tidak efektif harus diperbaiki atau dihentikan, meskipun populer secara politik.

Keempat, **audit dan pengawasan independen**. BPK, DPR, KPK, masyarakat sipil, akademisi, dan media perlu ruang untuk mengawasi anggaran.

Kelima, **perlindungan terhadap belanja produktif**. Saat tekanan fiskal muncul, belanja pendidikan berkualitas, kesehatan, infrastruktur produktif, dan riset tidak boleh selalu menjadi korban pertama.

Keenam, **penargetan subsidi dan bantuan**. Program sosial harus berbasis data yang akurat dan mekanisme pembaruan data yang dinamis.

Ketujuh, **pengelolaan risiko fiskal**. Utang, jaminan, BUMN, Danantara, PPP, dan risiko energi harus dilaporkan secara jelas.

Kedelapan, **partisipasi publik**. Masyarakat perlu dilibatkan dalam prioritas anggaran, terutama untuk program yang berdampak langsung.

15. APBN dan Pertumbuhan Inklusif

Pertumbuhan yang didorong APBN harus inklusif. Pertumbuhan inklusif berarti hasil pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh kelompok atas atau wilayah tertentu, tetapi memperluas kesempatan bagi masyarakat luas. APBN dapat mendukung pertumbuhan inklusif melalui beberapa cara.

Pertama, memperkuat pendidikan dan kesehatan dasar. Kedua, membangun infrastruktur wilayah tertinggal. Ketiga, memberi akses pembiayaan UMKM. Keempat, memperbaiki konektivitas digital. Kelima, mendukung pertanian, perikanan, dan ekonomi lokal. Keenam, memperkuat perlindungan sosial adaptif. Ketujuh, menciptakan lapangan kerja produktif melalui industri bernilai tambah.

Pertumbuhan inklusif juga membutuhkan kualitas kelembagaan. Jika belanja besar tetapi korupsi tinggi, manfaat hilang. Jika infrastruktur dibangun tetapi akses pasar tetap dikuasai segelintir pelaku, UMKM tidak naik kelas. Jika pendidikan dibiayai tetapi mutu rendah, produktivitas tidak naik. Karena itu, inklusivitas bukan hanya soal alokasi, tetapi juga tata kelola.

16. Skenario Masa Depan APBN Indonesia

Skenario 1: APBN sebagai Mesin Pertumbuhan Produktif

Dalam skenario optimistis, APBN digunakan untuk memperkuat sektor riil, memperbaiki kualitas SDM, menjaga daya beli, memperkuat pangan dan energi, serta mendorong investasi produktif. Defisit dijaga kredibel. Subsidi direformasi bertahap. Danantara dan BUMN dikelola transparan. Belanja sosial tepat sasaran. Pajak diperkuat secara adil. Dalam skenario ini, APBN menjadi mesin pertumbuhan dan legitimasi sekaligus.

Skenario 2: APBN sebagai Stabilizer yang Terbebani

Dalam skenario moderat, APBN tetap menjaga stabilitas, tetapi ruang fiskal menyempit karena subsidi, bunga utang, program sosial besar, dan tekanan energi. Pertumbuhan tetap sekitar 5%, tetapi transformasi produktivitas lambat. Pemerintah berhasil menghindari krisis, tetapi belum menciptakan lompatan.

Skenario 3: APBN sebagai Mesin Politik Populis

Dalam skenario pesimistis, APBN terlalu banyak dibebani program populer dan penugasan politik. Subsidi melebar. Defisit mendekati atau melewati batas. Belanja produktif terdesak. Investor meragukan disiplin fiskal. Rupiah dan yield obligasi tertekan. APBN menjadi alat menjaga dukungan jangka pendek, tetapi melemahkan pertumbuhan jangka panjang.

17. Rekomendasi Kebijakan

Pertama, **jaga disiplin fiskal tanpa mematikan pertumbuhan**. Batas defisit penting sebagai jangkar kredibilitas, tetapi konsolidasi fiskal harus dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja dan penerimaan, bukan sekadar pemotongan mekanis.

Kedua, **ubah orientasi dari serapan ke dampak**. Setiap program besar harus memiliki indikator hasil yang terukur: penurunan kemiskinan,

peningkatan kualitas gizi, produktivitas, pekerjaan, ekspor, atau kualitas layanan.

Ketiga, **reformasi subsidi energi secara bertahap dan berkeadilan**.

Subsidi luas harus diarahkan menjadi bantuan tepat sasaran, dengan perlindungan bagi kelompok rentan dan pekerja yang bergantung pada energi.

Keempat, **perkuat basis penerimaan negara**. Reformasi pajak harus memperluas kepatuhan, menutup celah, memperbaiki administrasi, dan memastikan kontribusi adil dari kelompok mampu serta sektor yang memperoleh rente.

Kelima, **lindungi belanja modal manusia**. Pendidikan, kesehatan, gizi, riset, dan pelatihan tenaga kerja harus menjadi prioritas karena menentukan produktivitas jangka panjang.

Keenam, **perkuat transfer daerah berbasis kinerja**. Transfer harus mendorong layanan publik daerah, bukan sekadar membiayai rutinitas birokrasi.

Ketujuh, **transparansikan risiko fiskal off-budget**. BUMN, Danantara, PPP, dan jaminan pemerintah harus dilaporkan secara terbuka agar tidak menjadi beban tersembunyi.

Kedelapan, **perkuat pengawasan publik**. Data APBN harus mudah dibaca. Masyarakat, akademisi, media, DPR, dan lembaga audit harus dapat mengevaluasi anggaran.

Kesembilan, **bangun komunikasi fiskal yang jujur**. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa setiap program memiliki biaya dan setiap biaya harus dibiayai secara bertanggung jawab.

Kesepuluh, **jadikan APBN alat transformasi, bukan sekadar distribusi**.

Belanja negara harus diarahkan pada produktivitas, nilai tambah, ketahanan energi, kemandirian pangan, digitalisasi, dan pemerataan.

18. Kesimpulan

APBN adalah jantung ekonomi-politik negara. Ia memompa sumber daya ke seluruh tubuh bangsa: ke sekolah, rumah sakit, desa, kota, jalan, pelabuhan, sawah, industri, keluarga miskin, pegawai negeri, investor, dan generasi masa depan. Karena itu, APBN tidak boleh dipahami hanya sebagai tabel angka. Ia adalah instrumen moral, politik, dan ekonomi.

Ketika APBN menjadi mesin pertumbuhan, ia membangun produktivitas, memperluas kesempatan, menjaga daya beli, memperbaiki modal manusia, dan memperkuat daya saing nasional. Ketika APBN menjadi mesin politik, ia membangun legitimasi, menjaga koalisi, menenangkan tekanan sosial, dan mendistribusikan manfaat. Keduanya dapat saling mendukung bila politik diarahkan pada kepentingan publik. Tetapi keduanya dapat bertentangan bila politik anggaran dikuasai kepentingan jangka pendek.

Indonesia pada 2026 berada pada titik penting. APBN 2026 memiliki ambisi untuk mempercepat pertumbuhan dan memperkuat sektor riil, tetapi juga menghadapi tekanan subsidi energi, program sosial besar, risiko defisit, dinamika rupiah, dan ketidakpastian global. OECD memperingatkan bahwa defisit dapat melebar menuju 3,0% PDB jika tekanan subsidi energi tidak diimbangi, sementara reformasi subsidi, efisiensi belanja publik, dan tata kelola investasi publik menjadi kunci menjaga keberlanjutan fiskal. ([OECD](#))

Kesimpulan utama artikel ini adalah bahwa APBN yang baik bukan APBN yang bebas dari politik, melainkan APBN yang menjadikan politik sebagai energi pembangunan. Politik anggaran harus membawa aspirasi rakyat, tetapi teknokrasi fiskal harus menjaga agar aspirasi itu diterjemahkan menjadi program yang produktif, adil, dan berkelanjutan. APBN harus menjadi mesin pertumbuhan, tetapi pertumbuhan yang dikejar harus berakar pada keadilan sosial dan tanggung jawab fiskal.

Pada akhirnya, APBN adalah ujian kapasitas negara. Negara yang kuat bukan negara yang sekadar mampu membelanjakan uang besar, tetapi negara yang mampu mengubah setiap rupiah belanja publik menjadi nilai

publik. Negara yang bijaksana bukan negara yang menolak politik dalam anggaran, tetapi negara yang memastikan politik anggaran tunduk pada kesejahteraan rakyat, produktivitas nasional, dan masa depan generasi berikutnya.

Glossarium

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang memuat pendapatan, belanja, defisit atau surplus, dan pembiayaan.

Belanja Negara

Pengeluaran pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang digunakan untuk membiayai program, layanan, subsidi, investasi, dan kewajiban negara.

Belanja Produktif

Belanja yang meningkatkan kapasitas ekonomi jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, riset, dan dukungan sektor produktif.

Defisit APBN

Keadaan ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara dalam satu tahun anggaran.

Efisiensi Belanja Publik

Kemampuan belanja negara menghasilkan output dan outcome sebesar mungkin dengan biaya yang wajar.

Fiscal Multiplier

Dampak tambahan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional.

Fiscal Rule / Aturan Fiskal

Batas atau pedoman formal untuk menjaga disiplin fiskal, misalnya batas defisit APBN maksimal 3% PDB.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pajak, belanja, defisit, utang, dan pembiayaan negara.

Kontrak Sosial Fiskal

Hubungan kepercayaan antara negara dan warga: warga membayar pajak dan negara mengelola dana publik untuk kepentingan umum.

Mesin Politik

Fungsi APBN sebagai instrumen membangun legitimasi, menjaga dukungan, mengelola koalisi, dan mendistribusikan manfaat politik.

Mesin Pertumbuhan

Fungsi APBN sebagai instrumen mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja produktif, stabilisasi, perlindungan daya beli, dan investasi publik.

Off-Budget Financing

Pembiayaan kegiatan pembangunan di luar mekanisme APBN langsung, misalnya melalui BUMN, badan investasi, atau skema kemitraan.

Patronase

Distribusi sumber daya atau keuntungan kepada kelompok tertentu untuk memperoleh atau mempertahankan dukungan politik.

Pembiayaan Anggaran

Sumber dana untuk menutup defisit APBN atau memanfaatkan surplus, termasuk penerbitan utang dan pembiayaan non-utang.

Pendapatan Negara

Penerimaan negara yang berasal dari pajak, kepabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah.

Penganggaran Berbasis Kinerja

Sistem anggaran yang menilai program berdasarkan hasil dan dampak, bukan hanya jumlah dana yang diserap.

Political Budget Cycle

Kecenderungan pemerintah menggunakan anggaran secara lebih ekspansif atau populer menjelang momen politik atau pemilu.

Rente Fiskal

Keuntungan yang diperoleh kelompok tertentu dari akses khusus terhadap anggaran, subsidi, insentif, atau proyek pemerintah.

Risiko Kontinjensi

Risiko fiskal yang belum menjadi kewajiban langsung, tetapi dapat menjadi beban APBN bila kondisi tertentu terjadi.

Ruang Fiskal

Kemampuan pemerintah untuk membiayai prioritas tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.

Subsidi

Dukungan pemerintah untuk menurunkan harga barang atau jasa tertentu atau membantu kelompok tertentu.

Transfer ke Daerah

Dana dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung otonomi, layanan publik, dan pemerataan.

Daftar Pustaka

Alesina, A., & Perotti, R. (1995). Fiscal expansions and adjustments in OECD countries. *Economic Policy*, 10(21), 205–248. DOI: 10.2307/1344590

Alesina, A., & Tabellini, G. (1990). A positive theory of fiscal deficits and government debt. *Review of Economic Studies*, 57(3), 403–414. DOI: 10.2307/2298021

Barro, R. J. (1979). On the determination of the public debt. *Journal of Political Economy*, 87(5), 940–971. DOI: 10.1086/260807

Besley, T., & Persson, T. (2011). *Pillars of prosperity: The political economics of development clusters*. Princeton University Press.

Buchanan, J. M., & Wagner, R. E. (1977). *Democracy in deficit: The political legacy of Lord Keynes*. Academic Press.

Drazen, A. (2000). *Political economy in macroeconomics*. Princeton University Press.

Drazen, A., & Eslava, M. (2010). Electoral manipulation via voter-friendly spending: Theory and evidence. *Journal of Development Economics*, 92(1), 39–52. DOI: 10.1016/j.jdeveco.2009.01.001

Gupta, S., Clements, B., Baldacci, E., & Mulas-Granados, C. (2005). Fiscal policy, expenditure composition, and growth in low-income countries. *Journal of International Money and Finance*, 24(3), 441–463. DOI: 10.1016/j.jimonfin.2005.01.004

International Monetary Fund. (2026). *Indonesia: 2025 Article IV consultation—Press release; staff report; and statement by the Executive Director for Indonesia*. IMF Country Report No. 2026/010. DOI: 10.5089/9798229035576.002

Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026*. JDIH Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Pemerintah dan Banggar DPR sepakati usulan postur APBN 2026*. Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN 2026: Belanja prioritas mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi*. Direktorat Jenderal Anggaran.

Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.

Nordhaus, W. D. (1975). The political business cycle. *Review of Economic Studies*, 42(2), 169–190. DOI: 10.2307/2296528

OECD. (2026). *OECD Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1: Indonesia*. OECD Publishing.

Persson, T., & Tabellini, G. (2000). *Political economics: Explaining economic policy*. MIT Press.

Ramey, V. A. (2011). Can government purchases stimulate the economy? *Journal of Economic Literature*, 49(3), 673–685. DOI: 10.1257/jel.49.3.673

Rogoff, K. (1990). Equilibrium political budget cycles. *American Economic Review*, 80(1), 21–36.

Tanzi, V., & Schuknecht, L. (2000). *Public spending in the 20th century: A global perspective*. Cambridge University Press.

Von Hagen, J. (2006). Fiscal rules and fiscal performance in the EU and Japan. *Monetary and Economic Studies*, 24(1), 25–60.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 23 June 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/6a388ad7-46fc-83ec-b5c6-bc3ad53631f7)). chatgpt.com/c/6a388ad7-46fc-83ec-b5c6-bc3ad53631f7